



Risalah Kebijakan

• • • • Nomor 2, Juni 2022



Program Indonesia Pintar dan Peningkatan Akses serta Kualitas Belajar Siswa Miskin



Ringkasan

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan dana kepada peserta didik dari keluarga miskin. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian bantuan dana PIP memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan, terlihat dari peningkatan APK, menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya angka melanjutkan pendidikan. Namun, di jenjang SD, PIP tidak memberi dampak signifikan bagi anak dari keluarga miskin. Dampak cukup besar justru terlihat pada anak berkebutuhan khusus (ABK).

Selain mendorong peningkatan akses, PIP juga berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi belajar dan prestasi siswa. Hal itu terlihat dari peningkatan semangat belajar, keaktifan belajar, serta prestasi akademik dan nonakademik siswa.

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, risalah kebijakan ini merekomendasikan agar PIP terus ditingkatkan. Khusus untuk jenjang SD, PIP perlu difokuskan pada anak penyandang disabilitas. Selain itu, perlu dipertimbangkan agar penerima PIP juga berasal dari anak usia sekolah yang belum bersekolah dan anak putus sekolah, karena saat ini PIP hanya menyasar siswa yang sedang bersekolah. Sementara untuk meningkatkan mutu belajar dan prestasi siswa, penggunaan dana PIP perlu diarahkan untuk menunjang kebutuhan pembelajaran dan pencapaian prestasi siswa.

Konteks

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan dana kepada peserta didik dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Jika dilihat dari tujuan PIP seperti yang tertuang dalam Persesjen Kemendikbud No. 3 Tahun 2021, PIP ditujukan untuk memperluas akses pendidikan agar setiap anak dapat bersekolah, meskipun kurang mampu dari segi ekonomi. Sejauh ini pemerintah telah memberikan subsidi siswa miskin melalui PIP dengan jumlah dana yang cukup besar dengan harapan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, dan pengurangan angka putus sekolah.

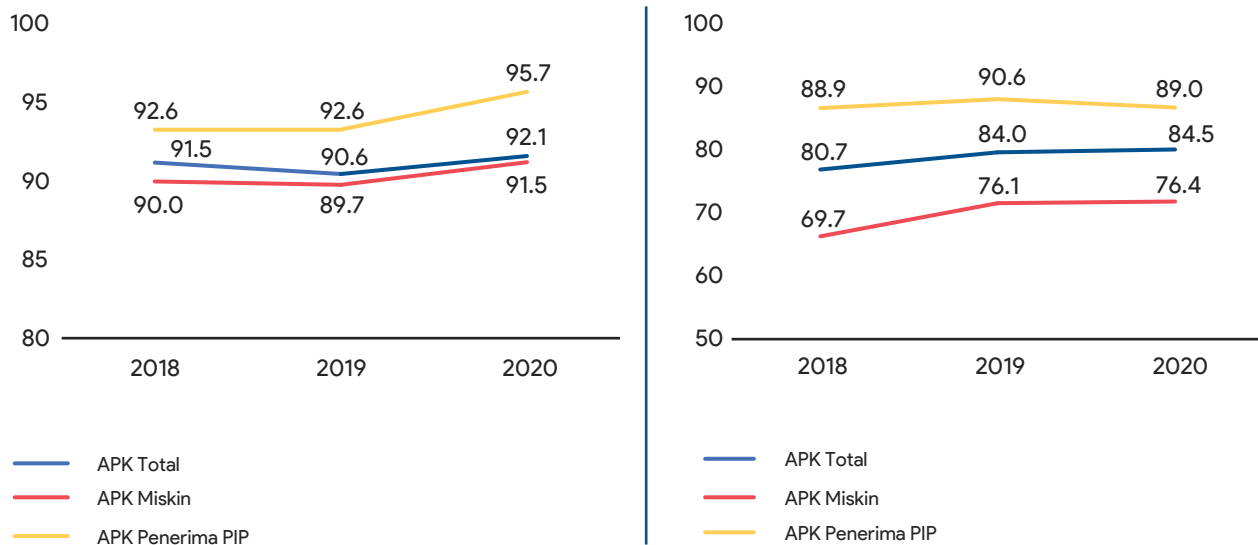
PIP bagi siswa miskin terus ditingkatkan baik dari segi jumlah penerima, penyaluran, maupun pemanfaatannya. Hal ini untuk menjamin siswa miskin tetap bersekolah, mampu melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, bahkan meraih prestasi yang tinggi. Dalam jangka panjang, PIP diharapkan memberikan dampak positif terhadap akses layanan pendidikan yang bermutu, khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, dan pengurangan angka putus sekolah. Penurunan angka putus sekolah dan angka melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi (angka partisipasi) sejauh ini belum mencapai target yang diharapkan (Renstra Kemendikbud 2020-2024). Di sisi lain, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa sasaran penerima PIP belum menjangkau seluruh siswa miskin di sekolah, dan bahkan beberapa siswa yang seharusnya tidak berhak menerima PIP memperoleh dana PIP (Puslitjak, 2016 & 2017).

Mencermati kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji apakah program PIP berdampak terhadap akses dan proses belajar, dengan mendalami apakah dana PIP diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, menganalisis apakah bantuan dana PIP tersebut dapat meningkatkan partisipasi anak usia 6-21 tahun, serta mengetahui bagaimana peningkatan proses belajar penerimanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan fokus kajian, yaitu (1) dampak PIP terhadap akses pendidikan dengan indikator perkembangan angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi sekolah (APS), dan angka melanjutkan (AM); dan (2) dampak PIP terhadap proses belajar dengan indikator partisipasi dan motivasi belajar, dan prestasi akademis dan non-akademis. Data dikumpulkan melalui *desk study/desk review*, diskusi kelompok terpusat (DKT), dan survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana pemilihan wilayah sasaran dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin dan jumlah siswa miskin. Daerah sampel terpilih, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Kupang.

PIP memberikan dampak positif pada peningkatan APK, menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya angka melanjutkan pendidikan.

Salah satu aspek yang dapat dijadikan tolok ukur peningkatan akses pendidikan ialah melihat perkembangan angka partisipasi kasar (APK) peserta didik. Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK), perkembangan APK semakin meningkat dari tahun 2018-2020. Meskipun APK SMP tahun 2019 sempat menurun dari 2018, akan tetapi kembali naik pada 2020. Capaian APK SMP dan SMA/SMK masih berada di bawah 100 yang mengindikasikan bahwa masih terdapat anak usia sekolah di jenjang ini yang belum bersekolah. Hal ini berbeda dengan di jenjang SD, yang capaian APK-nya sudah melebihi 100.

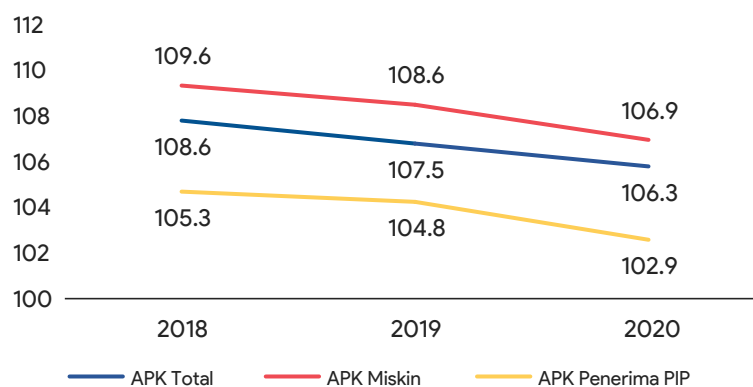
Penetapan peserta didik penerima PIP didasarkan pada latar belakang keluarga kategori miskin atau rentan miskin. Ketentuan miskin/rentan miskin yang ditetapkan adalah desil 1 sampai 4 atau 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah (Puslapdik, 2021). Grafik 1(a) dan 1(b) menggambarkan perkembangan capaian APK SMP dan SMA/SMK, APK secara keseluruhan (total), APK kelompok miskin (APK 40%), dan APK penerima PIP (APK 40% PIP).



Sumber: Susenas KOR BPS, 2018-2020

Grafik 1 Perkembangan APK, APK kelompok miskin, dan APK Penerima PIP, Jenjang SMP (a) dan SMA/SMK (b) Tahun 2018-2020

Jenjang pendidikan SMP memiliki kondisi yang hampir sama dengan SMA/SMK. Capaian APK pada SMP dan SMA/SMK secara total belum sepenuhnya mencapai 100%, artinya terdapat anak usia sekolah SMP yang belum atau tidak bersekolah. Capaian APK penerima PIP jika dibandingkan dengan APK kelompok miskin ternyata lebih besar. Sama halnya dengan SMP, artinya ketika peserta didik SMA/SMK diberikan PIP, capaian APK meningkat lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya bantuan PIP mendorong akses yang lebih luas kepada peserta didik untuk bersekolah di SMP dan SMA/SMK.



Sumber: Susenas KOR BPS, 2018-2020

Grafik 2 Perkembangan APK Total, APK Miskin, dan APK Penerima PIP, Jenjang SD Tahun 2018-2020

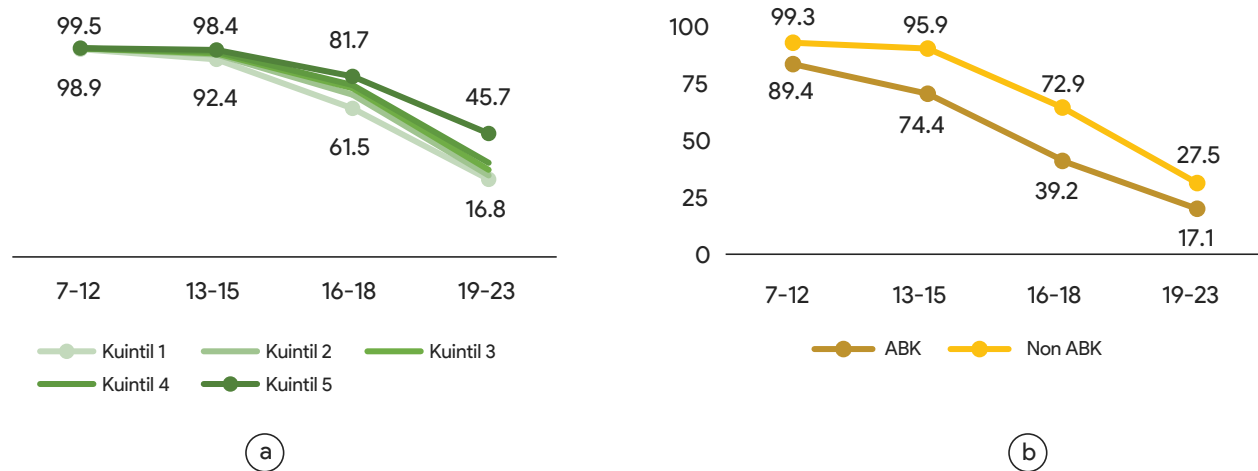
Sama halnya dengan APK total, APK kelompok miskin dan APK penerima PIP SD juga sudah lebih dari 100 (Grafik 2). Artinya pada jenjang SD, anak sudah mendapatkan akses pendidikan. Posisi APK SD kelompok miskin berada di atas APK secara total, di mana anak yang masuk dalam kategori kesejahteraan sosialnya 40% terendah lebih banyak yang bersekolah dibandingkan kategori kesejahteraan sosial 60% teratas. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2, yang mana kategori kesejahteraan sosial terendah ternyata didominasi oleh anak-anak dengan usia di bawah ketentuan usia masuk SD, yaitu 7 (tujuh) tahun. Dapat diartikan pula bahwa anak-anak dengan usia prasekolah (usia 4-6 tahun) di kelompok kategori kesejahteraan sosialnya terendah banyak yang tidak mengikuti pendidikan PAUD, tetapi langsung masuk ke SD. Salah satu alasannya adalah di SD lebih murah atau tidak dipungut biaya dibandingkan di PAUD (khususnya TPA dan TK/RA). Hal ini yang menyebabkan capaian APK kelompok miskin lebih tinggi dibandingkan dengan APK total.

Tabel 1 Sebaran Jumlah Peserta didik SD Kelas 1 Berdasarkan Usia

Quintil	Usia (tahun)						Total
	5	6	7	8	9	10	
1	202	2.625	3.379	593	137	56	6.992
2	120	2.207	2.718	301	37	24	5.407
3	100	1.914	2.476	253	30	26	4.799
4	79	1.664	2.029	177	32	16	3.997
5	42	1.168	1.454	102	15	10	2.791
Total	543	9.578	12.056	1.426	251	132	23.986

Sumber: BPS KOR Sesenas, diolah, 2020

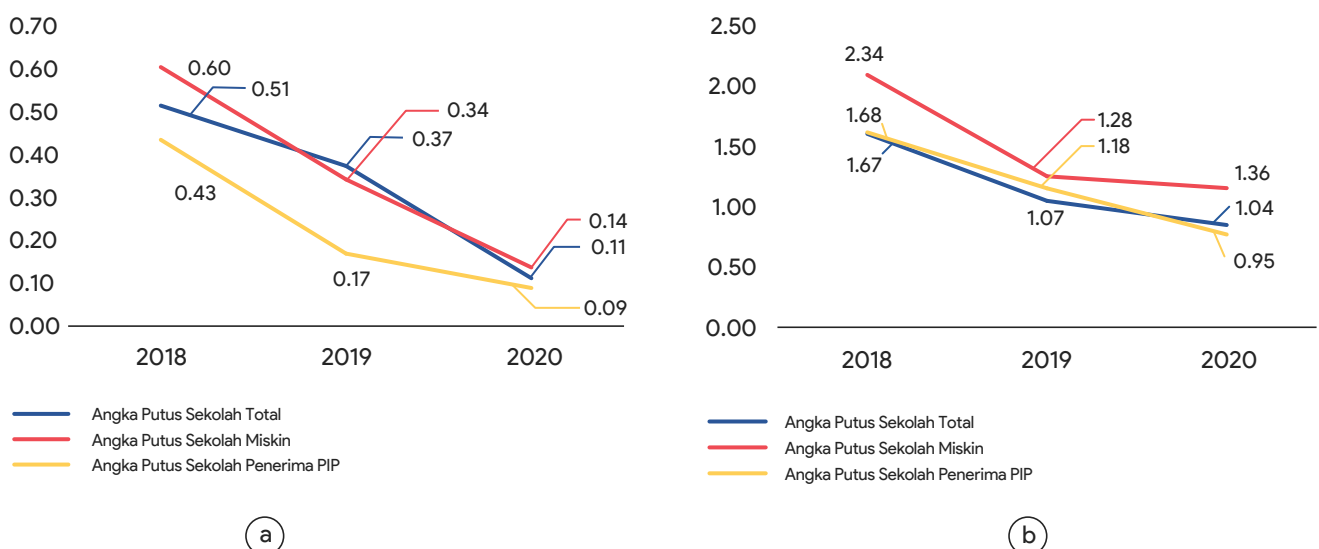
Anomali lain terjadi pada capaian APK SD penerima PIP yang lebih rendah dari capaian APK kelompok miskin (lihat Grafik 2). Hal ini mengindikasikan bahwa PIP yang diberikan kepada peserta didik SD sepertinya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan APK. Jika dilihat angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok ekonomi, dan status disabilitas (Grafik 3a dan 3b) dapat dilihat bahwa kesenjangan peserta didik usia 7-12 tahun yang seharusnya menjadi usia anak SD sangat kecil antara kuintil 1 (status ekonomi 20% terendah) dan kuintil 5 (status ekonomi 20% teratas). Artinya ketika dilihat dari status ekonomi, baik peserta didik yang berada di kuintil 1 atau 5 akan tetap bersekolah tanpa atau dengan adanya PIP. Berbeda dengan angka partisipasi sekolah peserta didik jika dilihat dari kelompok disabilitas (Grafik 3b), kesenjangan antara anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan non-ABK pada usia 7-12 tahun cukup besar jika dibandingkan kesenjangan antara peserta didik di kuintil 1 dengan kuintil 5 pada usia 7-12 tahun. Oleh karena itu, pemberian PIP akan lebih berdampak pada anak penyandang disabilitas dibandingkan dengan jika sasaran PIP berdasarkan status ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitjakdibud juga menjelaskan bahwa PIP baru menjangkau sebagian kecil ABK, yakni hanya sebesar 13,25% (Zamjani dkk., 2018).

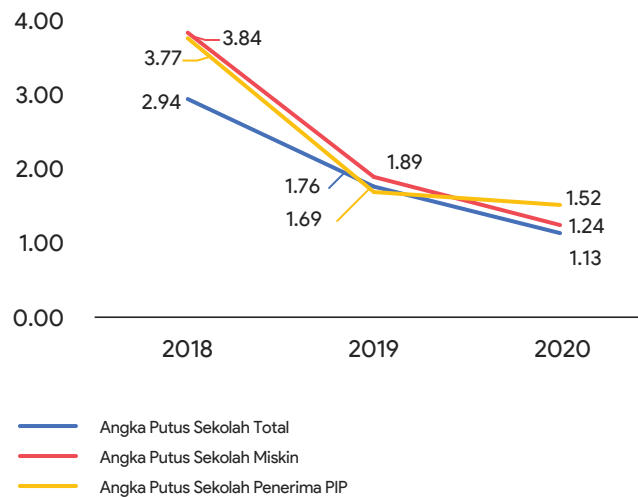


Sumber: Susenas KOR BPS, 2020

Grafik 3 Capaian Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Ekonomi (a), Status Disabilitas (b) Tahun 2020

Selain analisis terhadap APK, analisis terhadap anak putus sekolah juga menunjukkan angka putus sekolah peserta didik penerima PIP (40% PIP) cenderung lebih kecil dibandingkan dengan peserta didik kelompok miskin 40% di setiap satuan pendidikan (Grafik 4). Artinya, dengan adanya PIP, angka putus sekolah pada peserta didik dengan katagori kesejahteraan rendah yang menerima PIP tersebut menjadi lebih rendah. Temuan ini didukung juga dengan hasil FGD yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang, di mana responden kepala sekolah menyatakan bahwa dampak PIP membuat siswa tidak sampai mengalami putus sekolah, selain terdapat faktor lain, yaitu tidak dipungutnya biaya masuk SMA dan SMK di Provinsi Banten. Responden kepala sekolah di Kabupaten Bandung juga menyatakan hal yang sama bahwa adanya PIP membuat siswa tidak sampai mengalami putus sekolah.



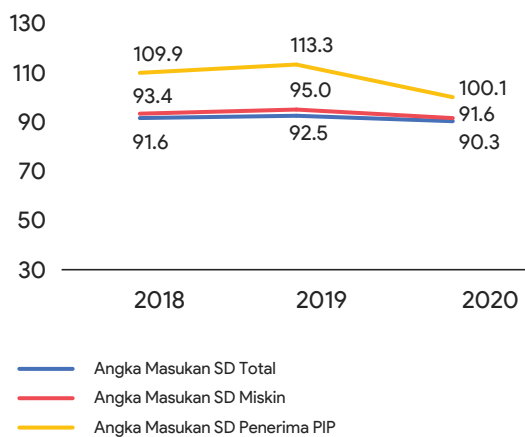


(c)

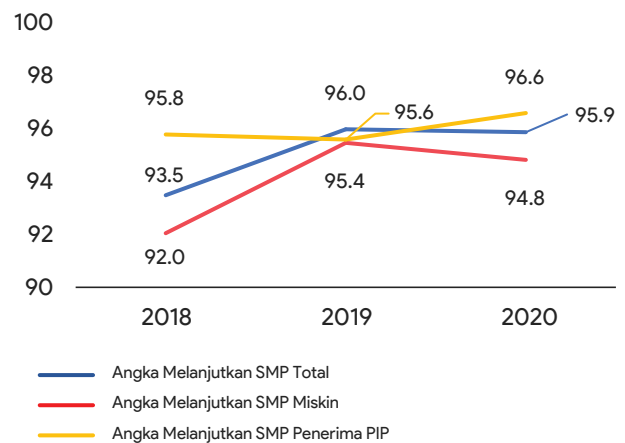
Sumber: Susenas KOR BPS, 2018- 2020

Grafik 4 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD (a), SMP (b), dan SMA/SMK (c) Tahun 2018-2020

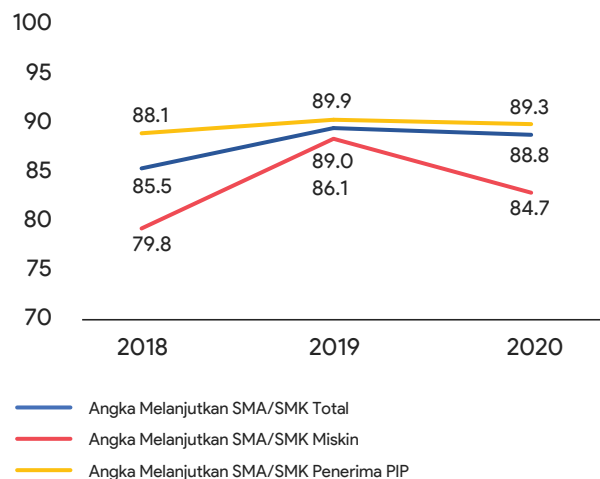
Begitu pula dengan perkembangan angka melanjutkan menunjukkan hasil yang cukup berarti, seperti halnya tampak pada grafik berikut.



(a)



(b)



(c)

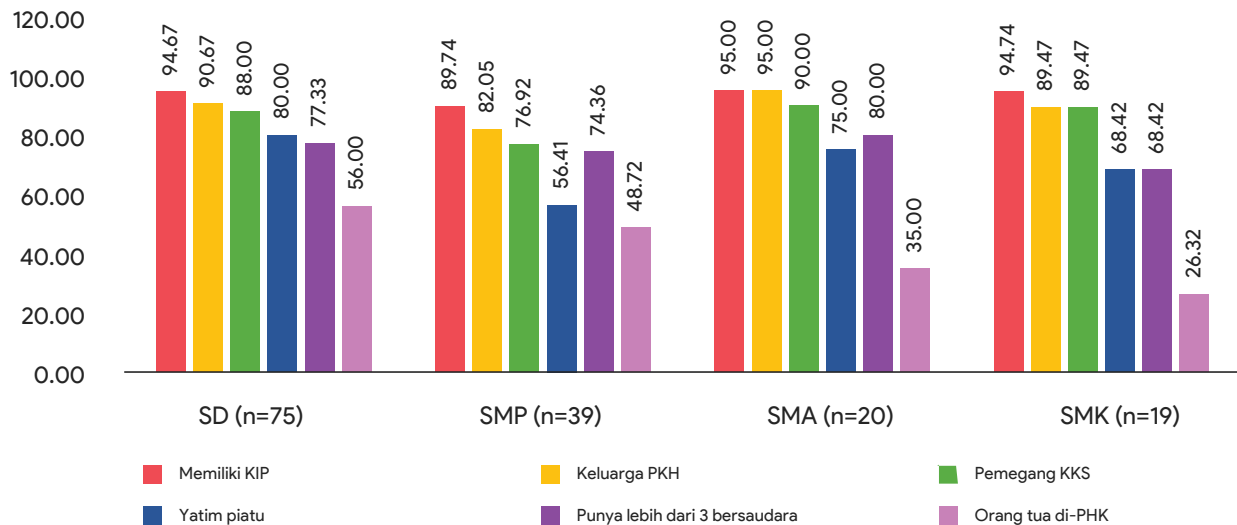
Sumber: Susenas KOR BPS, 2018- 2020

Grafik 5 Perkembangan Angka Masukan SD (a), Angka Melanjutkan SMP (b), dan Angka Melanjutkan SMA/SMK (c) Tahun 2018-2020

Secara keseluruhan, angka masukan peserta didik SD kategori 40% cenderung lebih besar dibandingkan angka masukan total (Grafik 5). Hal ini terjadi karena peserta didik yang masuk SD lebih banyak berasal dari peserta didik yang masuk kategori kesejahteraan sosial 40% terendah. Angka masukan SD penerima PIP (40% PIP) lebih tinggi dibandingkan dengan angka masukan SD kategori kelompok miskin (40%). Hal ini dikarenakan anak-anak pada kategori kesejahteraan sosial 40% terendah ini didominasi oleh peserta didik yang masuk SD pada usia di bawah 7 tahun. Artinya, anak-anak dengan kategori kesejahteraan sosialnya 40% terendah ini masuk ke SD didorong karena adanya peluang untuk mendapatkan PIP dibandingkan harus masuk ke PAUD.

Jika di SD yang dilihat adalah angka masukan SD, untuk SMP dan SMA/SMK adalah angka melanjutkan ke SMP dan angka melanjutkan SMA/SMK. Angka melanjutkan peserta didik penerima PIP cenderung lebih besar dibandingkan dengan peserta didik miskin. Hal ini menunjukkan, dengan adanya PIP angka melanjutkan pada peserta didik miskin yang menerima PIP di jenjang SMP dan SMA/SMK menjadi lebih meningkat. Selanjutnya hasil FGD dengan kepek di Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa adanya PIP meningkatkan motivasi siswa miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya lulusan SD melanjutkan ke SMP.

Pada Grafik 6, hasil survei menampilkan kriteria penerima PIP, yang mana umumnya penerima PIP memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), yatim piatu, berasal dari keluarga penerima PKH, dan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan kata lain, penetapan kriteria peserta didik penerima PIP sudah sesuai dengan juknis PIP yang menunjukkan bahwa peluang akses untuk mendapatkan layanan pendidikan diberikan pada anak yang memang berhak menerima.

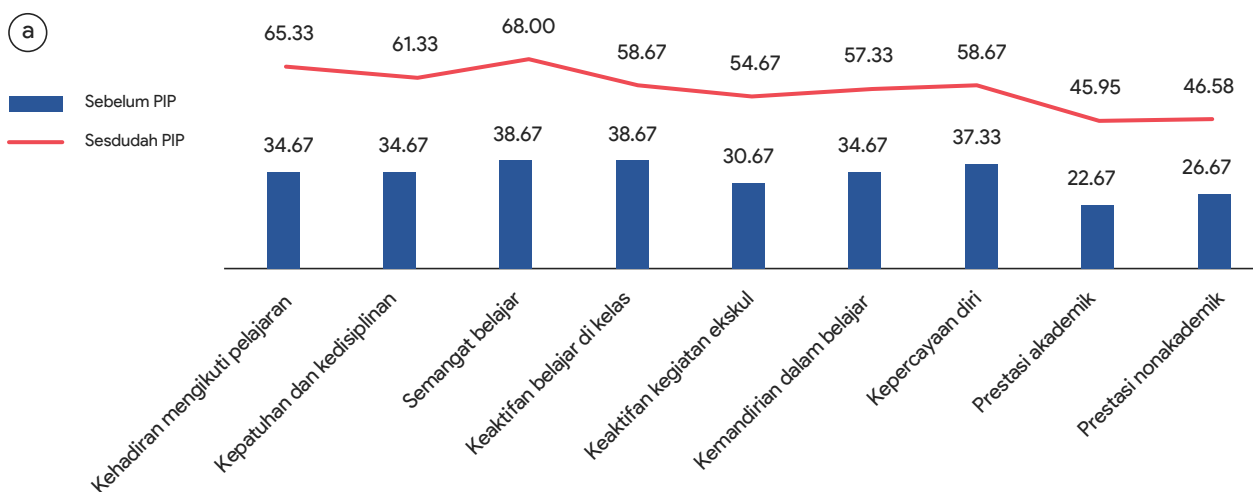


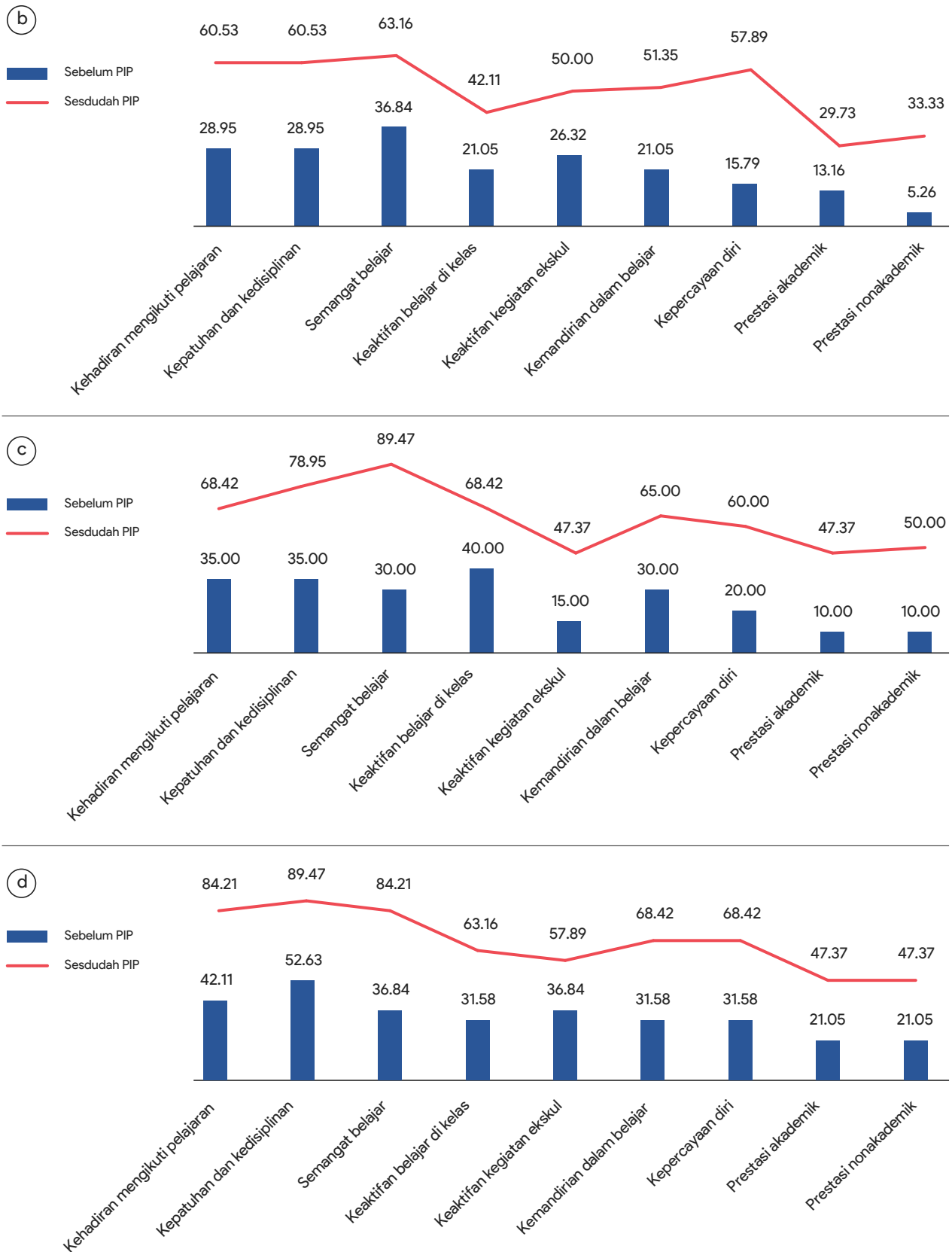
Grafik 6 Kriteria Peserta Didik Penerima PIP

Sumber: Survei Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2021

PIP mendorong peningkatan proses belajar dan prestasi siswa, seperti peningkatan semangat dan keaktifan belajar, serta prestasi akademik dan nonakademik.

Indikator yang dilihat untuk memahami peningkatan proses belajar di sini dilihat dari peningkatan semangat dan keaktifan belajar, serta prestasi akademik dan nonakademik. Pada siswa jenjang SD (Grafik 9a) sebelum menerima PIP, aspek tertinggi adalah *semangat belajar* dan *keaktifan belajar di kelas* dengan masing-masing persentase 38,67%. Sementara aspek terendah adalah *prestasi akademik* dengan persentase 22,67%. Setelah menerima bantuan dana PIP, aspek tertinggi adalah *semangat belajar* dengan persentase 68%, sementara aspek terendah adalah *prestasi akademik* dengan persentase 45,95%. Meskipun persentase *prestasi akademik* masih rendah saat setelah menerima PIP, namun peningkatannya menjadi yang paling tinggi di antara aspek lainnya, yaitu dua kali dari angka semula (dari 22,67% menjadi 45,95%). Diberikannya bantuan PIP secara signifikan meningkatkan rata-rata partisipasi belajar siswa SD untuk keseluruhan aspek tersebut sebesar hampir dua kali.





Grafik 7 Peningkatan Partisipasi Belajar pada jenjang SD (a), SMP (b), SMA (c), dan SMK (d) (%)

Sumber: Survei, Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan, 2021

Pada siswa jenjang SMP (Grafik 9b) sebelum menerima PIP, aspek tertinggi adalah *semangat belajar* dengan persentase 36,84%. Sementara aspek terendah adalah *prestasi nonakademik* dengan persentase 5,26%. Setelah menerima PIP, *semangat belajar* tetap menjadi aspek tertinggi dengan persentase 63,16% dan aspek terendah adalah *prestasi akademik* dengan persentase 29,73%. Namun, prestasi akademik mengalami kenaikan sebesar dua kali. *Prestasi nonakademik* naik sebesar enam kali dari yang sebelumnya 5,26% menjadi 33,33%. Hal ini juga didukung oleh persentase penggunaan dana PIP, di mana 79,49% siswa SMP penerima PIP menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhannya, seperti sepatu, tas, dan baju sehingga dapat memotivasi dalam pencapaiannya meraih prestasi di bidang nonakademik. Dapat diartikan bahwa dampak PIP untuk siswa SMP tidak hanya menjangkau prestasi akademik, tetapi juga mendorong capaian prestasi nonakademik siswa penerima.

Pada siswa jenjang SMA (Grafik 9c) sebelum menerima PIP, aspek tertinggi adalah *keaktifan belajar* di kelas dengan persentase 40%. Sementara aspek terendah adalah prestasi akademik dengan persentase 10%. Setelah menerima PIP, aspek tertinggi adalah *semangat belajar* dengan persentase 89,47%, dan aspek terendah adalah *keaktifan kegiatan ekstrakurikuler* dan *prestasi akademik* dengan masing-masing persentase 47,37%. Namun, prestasi akademik mengalami peningkatan hampir lima kali (dari yang sebelumnya 10% menjadi 47,37%). *Prestasi nonakademik* mengalami peningkatan sebesar lima kali, dengan persentase sebelum menerima PIP adalah 10% dan persentase setelah menerima PIP adalah 50%. Sama halnya untuk siswa SMP, dampak terhadap siswa SMA tidak hanya menjangkau prestasi akademik siswa, tetapi juga berkontribusi besar pada prestasi nonakademik. Hal ini juga didukung oleh penggunaan dana PIP, di mana siswa SMA penerima PIP menggunakan dana PIP untuk membeli kebutuhan pembelajaran, seperti membeli buku, alat tulis, dan juga alat pembelajaran lainnya yang mencapai 90% siswa. Hal ini menunjukkan pencapaian peserta didik penerima PIP dengan prestasi tertinggi baik akademik maupun nonakademik.

Pada siswa jenjang SMK (Grafik 9d) sebelum menerima PIP, aspek tertinggi adalah *kepatuhan dan kedisiplinan* dengan persentase 52,63%, sementara aspek terendah adalah *prestasi akademik* dengan persentase 21,05%. Setelah menerima PIP, aspek tertinggi juga tetap pada aspek *kepatuhan dan kedisiplinan* dengan persentase 89,47%, dan aspek terendah adalah *prestasi akademik* dan *nonakademik* dengan masing-masing persentase 47,37%. Namun, baik *prestasi akademik* dan *non akademik*, mengalami peningkatan sebesar dua kali. Hal ini juga didukung dengan hasil survei, di mana 78,95% siswa SMK menggunakan dana PIP untuk keperluan transportasi sekolah, karena 51,5% siswa SMK jarak rumahnya lebih dari 4 km dari sekolah. Sehingga, penggunaan dana PIP yang seyogianya lebih besar untuk kegiatan pembelajaran, justru didominasi untuk keperluan transportasi sekolah bagi sebagian siswa. Aspek *semangat belajar* mengalami peningkatan yang paling tinggi di antara aspek lain, yaitu dua kali (dari 36,84% menjadi 84,21%). Diberikannya bantuan PIP ini secara signifikan meningkatkan rata-rata partisipasi belajar siswa SMK untuk keseluruhan aspek tersebut sebesar dua kali.

Pada semua jenjang pendidikan saat setelah menerima PIP, aspek tertinggi untuk SD, SMP, dan SMA adalah *semangat belajar*. Perbedaan ada pada jenjang SMK, karena aspek tertinggi untuk SMK adalah *kepatuhan dan kedisiplinan*. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 15, SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Hal ini mendorong adanya penerapan budaya kerja pada SMK, agar siswa memiliki kemampuan beradaptasi terhadap situasi kerja. Budaya kerja tersebut meliputi disiplin, taat aturan, patuh pada pimpinan, kritis, komunikatif, sopan, jujur, kerja keras, kolaboratif, dan lainnya (Syahrudin, 2021).

Selain partisipasi belajar siswa, salah satu capaian yang dapat dilihat terkait peningkatan proses belajar adalah nilai rapor siswa penerima PIP setiap semester selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2018 – 2020. Kenaikan nilai rapor terjadi setiap tahun di semua tingkat pendidikan. Untuk siswa SD, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019. Untuk siswa SMP, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020. Untuk siswa SMA, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019. Sedangkan untuk siswa SMK kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020. Peningkatan nilai rapor siswa juga diimbangi dengan banyaknya jenis prestasi yang didapatkan oleh siswa. Prestasi akademik yang didapatkan lebih banyak daripada prestasi nonakademik dengan persentase masing-masing 54% dan 46%. Prestasi akademik yang telah dicapai antara lain peringkat kelas, Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Lomba Debat Bahasa, Siswa Mengenal Nusantara, dan lainnya. Untuk prestasi nonakademik antara lain diperoleh melalui Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Lomba Silat, Lomba Olahraga, Lomba Pramuka, dan lain-lain.

Rekomendasi Kebijakan

1. PIP untuk meningkatkan akses pendidikan

- a. Berdasarkan analisis yang dilakukan, akses di jenjang SD sudah sangat tinggi, sehingga dampak PIP relatif kecil. Untuk itu, PIP di jenjang SD perlu difokuskan pada anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas selama ini belum mendapat perhatian secara optimal, karena PIP belum sepenuhnya mengakomodir peserta didik disabilitas. PIP juga diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan optimal bagi penyandang disabilitas dengan memfasilitasi peralatan belajar yang dibutuhkan agar anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran lebih optimal.
- b. Dalam rangka menuntaskan akses pendidikan, perlu dipertimbangkan anak usia sekolah yang belum bersekolah serta anak yang sudah putus sekolah sebagai calon penerima PIP. Hal ini dikarenakan sampai saat ini PIP hanya menyasar pada peserta didik yang sudah berada di sekolah. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan program tertentu yang dilakukan oleh direktorat terkait yang ada di Kemendikbudristek.
- c. Untuk menjamin peserta didik penerima PIP tidak putus sekolah, maka pemberian bantuan dana PIP sebaiknya tetap diberikan hingga peserta didik dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya sampai selesai.

2. PIP untuk meningkatkan capaian belajar dan prestasi peserta didik

- a. Prestasi akademik dan nonakademik yang sudah dicapai oleh peserta didik penerima PIP perlu dipertahankan dengan mengarahkan penggunaan dana PIP agar lebih optimal pada kegiatan yang menunjang kebutuhan pembelajaran dan pencapaian prestasi.
- b. Kebijakan pemberian dana PIP tidak semata-mata untuk meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan capaian belajar dan prestasi siswa.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2018). Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1).
- BPS. (2020). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Herlinawati, dkk. (2017). *Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lusiana, L. (2017). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. *Vol 6 No, 1*, 6991-7005.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 193-204.
- Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(4), 6737-6750.

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

**Herlinawati
Siti Nur Azizah
Khoirur Roziqin**